KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR: perbaiki dong kualitas perpajakan
Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Waspada Jebakan Pertumbuhan Ekonomi Lima Persen

DPR: Perbaiki Dong Kualitas Perpajakan

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mewanti-wanti Pemerintah agar mewaspadai jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Hal itu membuat situasi perekonomian bangsa sulit maju.

"SITUASI perekonomian global dan perang Rusia-Ukraina hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Situasi ini harus diantisipasi. Jaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu pulih lebih cepat," kata Said dalam rapat Banggar bersama Pemerintah di Jakarta, kemarin.

Apalagi pertumbuhan ekonomi negara saat ini luar biasa. Ini bisa dilihat dari data pertumbuhan ekonomi nasipnal yang pada akhir tahun 2022 sudah berada pada angka 5,32 persen, melampaui angka pertumbuhan ekonomi negara sebelum terjadinya Covid-19.

Kendati begitu, pertumbuhan ekonomi cenderung tertahan di angka 5 persen selama beberapa tahun terakhir ini.

"Kita harus memeriksa lebih dalam problem yang menggganggu perekonomian nasional. Kita mesti keluar dari jebakan pertumbuhan lima persen," kata Said.

Untuk itu, dia mendorong Pemerintah menumbuhkan kembali *the most spending constream* yang menjadi *'trigger'* perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi penyebab the most spending constream yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, ditengarai dari regulasi yang tumpang tindih dan relatif tertutup.

Kedua, rendahnya kualitas institusi dalam hal koordinasi kebijakan.

Ketiga, rendahnya ketersediaan tenaga terampil dan infrastruktur yang belum sepenuhnya menciptakan konektivitas di semua wilayah. Dan keempat, rendahnya penerimaan perpajakan dan belanja negara.

"Keseluruhan masalah tersebut bukan persoalan baru. Tidak kurang DPR memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah untuk mndorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi," katanya.

Dukungan tersebut, jelas Said, di antaranya dukungan penuh dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

"Beleid ini memangkas banyak aturan agar menciptakan iklim kemudahan berusaha dan investasi," katanya.

Selain itu, Pemerintah bersama DPR juga telah mengan-firmasi dukungan anggaran 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Besaran 20 persen ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Pemerintah era Joko Widodo juga menggelorakan pembangunan insfrastruktur di Tanah Air. Targetnya, seluruh wilayah tanah air terhubung satu sama lain melalui moda transportasi dan komunikasi secara efisien.

"Efisiensi ini diharapkan memberi sumbangan ongkos lebih murah pada produksi barang dan jasa," jelasnya.

DPR, sambung dia, juga memberikan dukungan yang mendorong penerimaan perpajakan lebih berkualitas dan belanja yang lebih tersinkronisasi. DPR telah memberikan dukungan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuanga Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Namun, tetap saja harus diakui masih ada sejumlah kemajuan dan tantangan yang belum teratasi, meski telah mendapatkan dukungan dari segenap undang-undang dan peraturan tersebut.

"Jadi, masih terlalu dini bagi kita menyatakan bahwa Undang-Undang HPP bisa mengungkit ratio Perpajakan pada tahun 2022," jelasnya.

Diakui Said, memang benar terjadi lompatan *tax ratio* dari tahun 2019 sebesar 9,77 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 10,99 persen pada tahun 2022. Namun. Pemerintah harus berhati-hati meletakkan asumsi peningkatan pemasukan negara ini karena adanya dukungan di Undang-Undang HPP. Sebab, faktanya lonjakan penerimaan negara pada tahun 2022 justru lebih besar disumbang dari kenaikan berbagai komoditas ekspor.

Adapun neraca perdagangan di tahun 2022, menurut Said, mencapai rekor tertingginya sebesar 54,55 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga April 2023 ini, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 36 bulan berturut-turut.

"Kita tetap berkeyakinan Undang-Undang HPP secara struktur akan membantu perbaikan sistem perpajakan ke depan, sehingga cita-cita ratio perpajakan kita lebih kompatibel dan lebih nyata," ujarnya. ■ KAL